

**KORUPSI DAN INTEGRITAS PUBLIK:
Perspektif Nilai Budaya Bugis
dan Al-Qur'an
*Muhammad Yusuf *)***

Abstract

This article suggests integration between prominent values of the Bugis culture and internalization of values of Islamic doctrine in protecting and preventing corruption. This paper gives us view about the urgency of values of local wisdom which are discovered from principle of values of culture of Bugis which are relevant with values of Islamic doctrine. There are two principle opinions which serve as basis for that. *First*, Indonesian people have various local cultures which otomatically bring about glorious values which very closed to their life. *Second*, Indonesian people are the largest population of muslims in the world, where populations more than 80% are muslims, so approach to Islamic doctrine that is a relevant. Unfortunately, base on statistics data, Indonesia naowdays always the most corrupt nations in the world, whereas the corruption contradicts values both their cultures and Islamic doctrine which the both teach honesty and integrity. And, the step must start from reformation and reorientation of education, that is based on the values.

Key words: Corruption, local wisdom, Islam, Bugis, values.

*) Dosen DPK STAI Al-Furqan Makassar. Jln. Perintis
Kemerdekaan KM 15 Daya Makassar. E-mail:
m.yus56@yahoo.com/yusuf31muhammad@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, puncaknya ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, maka Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya, yaitu Indonesia mengalami kelahiran baru memasuki era reformasi. Pelopor reformasi dan para mahasiswa mengajukan tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal tersebut merupakan amanat reformasi yang mesti ditegakkan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia yang bersih, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Amanat UUD 1945 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang “adil dan makmur.” pemerintahan untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan dalam kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah reformasi menginjak usianya 15 tahun, kasus korupsi masih mewarnai penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang ditandai dengan banyaknya kasus korupsi yang terungkap oleh KPK. Penyelenggara negara yang meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif masih saja melakukan korupsi, dan terasa adanya kesenjangan sosial semakin menghimpit orang-orang yang tidak berdaya. Kesenjangan tersebut semakin “menganga lebar”, sementara para koruptor masih seringkali kebal hukum, yang berarti keadilan secara hukum masih sering dinilai sebagai “rapor merah”. Politik dan hukum masih tumpang tindih, sehingga politisi yang kuat bersama dengan kekuatan partainya masih sulit disentuh oleh lembaga penegak hukum secara

berkeadilan. Apalagi jika penegak hukum tertinggi di Republik ini justru menjadi tersangka melakukan tipikor dan kejahatan yang menyertainya.

Banyak survei menunjukkan bahwa masyarakat dan para pemangku kepentingan menilai bahwa politik uang (*money politics*) semakin meluas dan selalu terjadi dalam setiap kegiatan politik. Prilaku pemburu rente ternyata tidak hanya terjadi di birokrasi sebagaimana biasanya, melainkan juga di DPR atau di DPRD. Dalam proses legislasi, pengawasan dan penganggaran, para anggota DPR ataupun DPRD sering melakukan antara kewenangan yang dimilikinya dan uang serta sumber daya lainnya. (Dwiyanto, 2011: 209).² Demikian pula pemilukada gubernur, bupati, dan walikota, masih diwarnai politik uang. Rakyat pun seringkali ikut mengambil (menerima) uang “liar” untuk menjual suara dan kebebasannya dengan harga yang sangat murah.

Ada pula yang menilai bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memang telah mencapai babak baru yang ditandai dengan semakin banyaknya terungkap kasus korupsi yang melibatkan para anggota DPR, yang sebelumnya sulit tersentuh lembaga penegak hukum. Semakin banyaknya wakil rakyat yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya keseriusan memberantas korupsi di satu sisi. Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut masih menyisakan sebuah tandah tanya (?), sejauh mana KPK mampu menyelesaikan kasus korupsi yang sudah mewarnai penyelenggaraan birokrasi dan pemerintahan

² Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

tersebut? Apakah pemberantasan korupsi itu sudah menyentuh akar permasalahannya atau baru pada langkah-langkah reaktif semata?

B. APA ITU KORUPSI?

Korupsi berasal dari bahasa Inggris '*corrupt*'³ yaitu apabila seseorang mempunyai otoritas atau kekuatan untuk melakukan hal secara ilegal seperti mengambil uang atau hak orang lain. Korupsi (*corruption*) juga bermakna melakukan perubahan untuk menarik keuntungan mengambil sesuatu yang bukan haknya secara ilegal. Korupsi adalah sebuah istilah yang menunjukkan satu bentuk kejahatan pidana berupa mengambil, menerima, atau memberi yang bukan haknya secara melawan hukum terkait dengan jabatan dan kewenangan seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3). Termasuk tindak pidana korupsi menurut Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun

³ A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Fifth Edition (New York: Oxford University Press, 1995).

2001 adalah bahwa setiap orang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Tim Penyusun, 2011: 6).⁴ Definisi ini merupakan acuan dalam menentukan apakah sebuah perbuatan termasuk korupsi atau bukan.

C. PERSPEKTIF NILAI-NILAI BUDAYA BUGIS

Kearifan lokal lebih dikenal dengan istilah *al-'urf* dalam kajian hukum Islam. *Al-'Urf* merupakan salah sumber hukum Islam dalam arti menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Alquran dan Sunnah. Kearifan lokal yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai budaya Bugis, sebab kearifan lokal juga seringkali menjadi kesadaran masyarakat dan pemerintah bahwa dalam menghadapi tantangan demokratisasi dan globalisasi dibutuhkan penggalian ulang terhadap nilai-nilai dan khazanah lokal yang sarat dengan nilai-nilai keutamaan. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan cerminan budaya dan karakter masyarakat Indonesia.

Sejak dahulu kala, budaya masyarakat Sulawesi Selatan sudah tercatat di dalam literatur kuno orang Bugis-Makassar dengan istilah "Lontarak". Di dalam Lontarak, terdapat ajaran-ajaran yang menceritakan tentang asal-muasal kejadian manusia, terjadinya kerajaan, aturan-aturan kehidupan manusia, dan lain-lain. Meskipun penjelasan

⁴ Tim Penyusun Kementerian Agama R.I. Inspektorat Jenderal, *Mengembangkan Budaya Kerja Melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama* (Cet. V; Jakarta: Kementerian Agama R.I. Inspektorat Jenderal, 2011).

secara rinci tentang keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam masih terbilang kurang. Menurut Mattulada (1928) bahwa zaman pra Islam Sulawesi Selatan yang sampai sekarang dapat diungkapkan melalui sumber-sumber tertulis, barulah dapat diungkapkan sekitar abad XIV M. hingga diterimanya Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat pada awal abad XVII M. Dalam kurun waktu tersebut, sumber yang melukiskan keadaan masyarakat tersebut hanyalah Lontarak.⁵

Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang kuat berpegang pada adat (*ade'*). Menurut pemahaman masyarakat Bugis bahwa *ade'* sebagai esensi manusia, *ade'* itulah yang menyebabkan seseorang disebut manusia. Seorang yang tidak mengetahui, tidak menghayati, dan tidak memerankan diri dengan *ade'* maka tidak dapat disebut manusia. Dari *ade'* itulah manusia berpangkal. Tanpa *ade'* yang menjadi pangkal kemanusiaan, maka apa yang disebut *lempu'* (kejujuran), takwa kepada Allah dan mempertinggi *siri'* sebagai nilai dan martabat kemanusiaan, tidak mungkin terwujud. *Ade'* (adat) bagi orang Bugis itu adalah nilai dan harga dirinya. Aturan-aturan itu disebut *pangngaderreng*. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang menata kehidupan manusia.

Nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan orang Bugis itu perlu diungkapkan dalam setiap gerak kehidupan orang Bugis dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang penuh tantangan. Nilai-nilai itu diciptakan karena dimuliakan oleh para leluhur mereka sebagai peletak dasar

⁵Mattulada, *Sulawesi Selatan Pra Islam* dalam *Bulletin Yaperna* No. 12, tahun III.

masyarakat dan kebudayaan Bugis. Selanjutnya, dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam upaya mewariskannya, ia menyampaikan dalam bentuk nasihat atau pesan. Nasihat dan petaruh itu terdapat dalam *lontara'-lontara'* yang disebut *pappanngaja* dan *paseng*.⁶ Masyarakat dan kebudayaan Bugis dapat ditelusuri dalam beberapa sumber dan literatur, misalnya dalam "Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis".⁷ Kebudayaan orang Bugis mempunyai nilai-nilai utama berupa kejujuran, kecendikiaan, kepatutan, keteguhan, usaha atau kerja keras.

1. Jujur (*lempu'*)

Dalam perkataan orang Bugis, jujur disebut *lempu'*. *Lempu'* berarti "lurus" yang merupakan antonim dari kata 'bengkok'. Penggunaan kata tersebut dalam berbagai konteksnya, berarti juga ikhlas, benar, baik atau adil. Misalnya, *laleng malempu'* artinya jalan yang lurus. Dengan demikian antonim kata-kata tersebut yaitu curang, culas, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya.

Masyarakat Bugis mempunyai nilai budaya *siri'* (malu) dan *pesse* (solidaritas). Prinsip ini, bagi masyarakat Bugis adalah sebagai suatu norma yang sangat dihormati, karena hal itu merupakan bukti bahwa seseorang dapat menjaga kesucian diri dan kehormatannya. Dalam kaitan ini, syair orang Bugis menyebutkan: "*Duwai kuala sappo; unganna*

⁶A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2011), Dikutip dari Prof. Drs. G.H.M. Riekerk "Lahirnya Kedatuan Tomanurung" (ceramah), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 13 Agustus 1969.

⁷A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama ...*

panasae, belona kanukue" Artinya "Dua (hal) yang kujadikan pagar (pelindung diri dan kehormatan), yaitu bunga nangka dan hiasan kuku".⁸

Kata '*panasa*' pada '*unganna panasae*' yang sinonim dengan kata "*lempu*".⁹ Bila diberi tekanan *glottal stop* (') pada suku kata terakhir menjadi *lempu'*, maka kata itu berubah maknanya menjadi 'kejujuran'. Demikian pula kata "*belona kanukue*", digunakan untuk hiasan kuku (*belo kanuku*) yang disebut *pacci*. Kata *pacci*, bila mendapat tambahan bunyi "ng" pada akhir kata *pacci* menjadi *paccing*, maka kata itu berubah arti menjadi tidak ternoda, bersih, atau suci. Dengan demikian, "*Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue*" dapat diartikan "dua yang senantiasa dijadikan pagar yaitu kesucian dan kejujuran".¹⁰ Kesucian yang

⁸ Dalam tradisi Bugis ada dua norma yang sangat dihormati selain dari norma-norma agama, yaitu *siri* dan *passe*. *Siri* adalah "harga diri", yaitu suatu unsur yang sangat prinsipil dalam diri bagi orang Bugis. Bagi orang Bugis, *siri* adalah jiwa mereka, harga diri mereka, dan martabat mereka. Oleh karena itu, untuk menegakkan dan membela '*siri*' yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka orang Bugis akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *siri*' dalam kehidupan mereka. Hamid Abdullah, *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar* (Jakarta: Inti Dayu, 1985). Sementara *passe* adalah rasa solidaritas sesama orang Bugis, yaitu suatu nilai dimana ikut merasakan penderitaan orang lain dengan perasaan haru (empati) yang mendalam terhadap sesama. Christian Pelras, *Manusia Bugis*, terj. Abdul Rahman Abud dkk., *The Bugis* (Jakarta: Nalar bekerja sama Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005). Bandingkan dengan Mursalim, "Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur'an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan; Kajian terhadap Pemikiran-Pemikirannya" *Disertasi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

⁹ Mattulada, "Latoa; Suatu Lukisan terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis", *Disertasi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975), h. 13. Lihat pula Mursalim, *Tafsir Bahasa Bugis*....

¹⁰ Salah satu keunikan bahasa Lontarak adalah dalam satu kata bisa saja memiliki arti yang sangat jauh berbeda dengan arti

dimaksud dalam hal ini adalah suci dalam hati dan tindakan. Suci dalam hati itu mengandung arti adanya ketulusan hati, kebeningan jiwa, *mind set* positif, tidak iri, dan sebagainya. Sedangkan suci dalam tindakan adalah menjaga hal-hal yang memalukan, baik dalam perspektif budaya maupun perspektif agama. Dalam konteks penyelenggaraan kemasyarakatan dan ketatanegaraan "*paccing*" bermakna tidak melakukan korupsi yang memalukan. Kejujuran (*lempu'*) merupakan nilai utama budaya masyarakat Bugis, sehingga selama nilai ini terjaga dengan baik, maka hati dan tindakannya seluruhnya menjadi lurus dan tidak korup.

Ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (datu) Soppeng, La Manussa' Toakkareng, Tociung menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu: 1). memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, 2). dipercaya lalu tidak curang, artinya disandari lalu tidak berdusta, 3) tidak menyerakahi yang bukan haknya, dan 4) tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama. Dalam bahasa Bugis dikatakan:

*"Eppa' gau'na lempu'e: risalaie naddampeng,
riparennuangie temmacekko bettuanna risanresi
teppabbelleang, temmangoangenngi tenia alona,
tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng".¹¹*

lainnya demikian juga bacaanya, karena di dalam penulisannya tidak memiliki tanda-tanda khusus, misalnya *tasydid* (huruf doble) dan *maddah* (panjang). Contoh kata bk (*ba+ka*) dapat dibaca dengan berbagai bunyi, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Kata tersebut dapat dibaca bk (*baka*) yang berarti *keranjang*; tetapi ia juga dapat dibaca bk (*baka*) yang berarti *buah sukun*, dan dapat pula dibaca bk (*bakka'*) yang berarti *buah yang belum ranum (masih setengah matang)*.

¹¹A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011). Ia mengutip dari Lontarak

Ada empat inti perbuatan jujur: Memaafkan kesalahan orang lain padanya, jujur dalam menerima amanah, artinya tidak berkhianat, tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya, ia tidak menganggap kebaikan kecuali baik juga bagi orang lain.

Sejalan dengan pengertian di atas Kajaolaliddong, cendekiawan Bone, menjelaskan kejujuran ketika ditanya oleh Raja Bone mengenai pokok-pokok keilmuan. Apa saksinya atau bukti kejujuran? "Seruan ya Ampone!" Apa yang diserukan ya Kajao? "Adapun yang diserukan ialah:

*"Aja' muala taneng-taneng tania taneng-tanengmu. aja' muala warang- parang tania warang-parangmu nataniato mana'mu, aja'to mupassu tedong natania tedongmu, enrengge annyarang tania anynyarangmu, aja'to muala aju ripasanre' natengnia iko pasanre'i, aja'to muala aju riwetta wali netengnia iko mpetta waliwi."*¹²

"Jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu, jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu, bukan juga pusakamu; jangan mengeluarkan kerbau (dari kandangnya) yang bukan kerbaumu, juga kuda yang bukan kudamu, jangan ambil kayu yang disandarkan, bukan engkau yang menyandarkan, jangan juga kayu yang sudah ditetak ujung pangkalnya, yang bukan engkau yang menetaknya."

Pesan ini menunjukkan komitmen kejujuran, yakni tidak mengambil hak orang lain. Pemerintah tidak mengambil hak rakyat melalui korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Di dalam petuah Bugis di atas dikatakan, kayu

kepunyaan H. Andi Mappasala. Kalimat "...*tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng*" ini agaknya rancu. Sesuai dengan artinya "tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama" mestinya bunyinya kurang lebih demikian ""...*tennaseng deceng rekko- deceng rialemi, iyapa nariaseng deceng rekko- nassamarini pudeceng*."

¹²A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama...*

yang sudah dipotong pertanda ada yang punya. Kalau yang tersimpan di pinggir jalan saja dipesankan agar tidak diambil, apalagi yang jelas dijaga di dalam pagar berarti jelas tidak boleh diambil karena milik orang lain. Pesan ini diungkapkan dalam bahasa Bugis dengan sangat halus dan mengandung kedalaman makna, yakni komitmen kejujuran. Bagi orang Bugis, kandungan filosofis pesan tersebut merupakan nilai dan harga dirinya. Kejujuran (*lempu'*) adalah harga dirinya, sehingga jika ia kehilangan kejujuran berarti kehilangan kepercayaan dan pada saat yang sama harga dirinya ikut lenyap. Sebaliknya, jika kejujuran terpelihara dengan baik, maka nilai dan harga diri serta martabat insaninya ikut terpelihara dengan baik. Dalam pandangan nilai-nilai utama kebudayaan Bugis, kesesuaian antara kata dan perbuatan disebut "*taro ada taro gau*" (antara kata dan perbuatan sama). "*Ada*" (kata) adalah pegangan, ketika ia diucapkan atau keluar dari mulut maka bukan lagi milik yang mengucapkan, sehingga ia akan menjadi alat ukur orang lain tentang orang yang mengucapkan. Pembuktiannya dalam bentuk perilaku atau perbuatan nyata. Jadi, mengeluarkan kata harus penuh pertimbangan agar tidak asal keluar tanpa makna kebaikan.

2. Kecendikiaan (*Amaccang*)

Kejujuran dan kecendikiaan adalah prinsip bagi orang Bugis yang saling berhubungan. Yang dinamakan kecendikiaan adalah tidak ada yang sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut, dengan kata-kata yang baik dan lemah-lembut lagi percaya kepada sesama manusia. Yang dinamakan jujur ialah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan lagi takut kepada Tuhan.¹³

¹³A Hasan Machmud, Silasa, h. 36, butir 31. Bandingkan

Dalam bahasa Bugis 'cendikia' sering diartikan 'acca', yaitu pandai atau pintar. *Acca* ini lebih kepada makna yang positif, dan tidak sebaliknya. *To acca* adalah orang mempunyai kearifan. *Acca* adalah perilaku baik cara berpikir maupun cara bertindak dapat menjadi pertimbangan yang arif.¹⁴ Jadi, *acca* bukan latar belakang pendidikan formal, melainkan juga nilai-nilai kearifan yang menghiasi cara berpikirnya dan bertindakya. Tidak disebut pula *To Acca* kalau tidak jujur. Kalau ada orang berilmu tetapi tidak jujur, tidak pemaaf, serakah, mengambil yang bukan haknya maka hakikatnya ia tidak pandai (bukan *To Acca*). Sayangnya di Indonesia, pelaku korupsi justru dari kalangan sarjana. Itu berarti, lembaga pendidikan yang pernah ia tempati menimbah ilmu tidak gagal menjadikannya sebagai cendikiawan karena tidak memiliki karakter yang baik.

Pertengkarannya yang terjadi antara sesama anggota DPR pada momentum sidang dan rapat paripurna menunjukkan dirinya sebagai tipologi penguasa yang tidak cendikia. Mereka bukan pemimpin, tetapi hanya penguasa. Perbuatan semacam itu saja tidak pantas dilakukan oleh orang biasa, apalagi anggota Dewan yang terhormat. Bahkan di lembaga pendidikan sekalipun ada orang yang serakah, melakukan hal-hal di luar kepatutan maka itu tidak menunjukkan dirinya sebagai cendikiawan termasuk professor sekalipun.

3. Kepatutan (*Asitinajang*)

Kepatutan, kepantasan, kelayakan dalam bahasa

dengan Waspada Santing dkk., *Refleksi 75 Tahun Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah; Meneguhkan Eksistensi Alauddin* (Cet. I; Makassar; Pustaka Al-Zikra, 2010).

¹⁴A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama...*

Bugis disebut *asitinajang*. Kata ini berasal dari *tinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontarak mengatakan: "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu."¹⁵ *Ade' Wari* (adat perbedaan) dalam budaya Bugis pada prinsipnya mengatur segala sesuatu agar berada pada tempatnya, termasuk perbuatan *mappasitinaja*. Merusak tata tertib adalah kezaliman. Kewajiban yang dibaktikan dengan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu perbuatan yang patut, banyak atau sedikit, tidak dipersoalkan dalam konsep *sitinaja*. Hal ini sesuai dengan petuah: "*Alai cedde'e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang*".¹⁶ Artinya: "Ambillah yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan menolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan". Prinsip *asitinajang* adalah *sitinajai resona na appoleangenna*. Artinya, kepatutan adalah cocok atau sesuai antara pekerjaannya dengan pendapatannya (hasil yang diperoleh). Dalam prinsip budaya orang Bugis yang menghayati dan mengamalkan budayanya, memperoleh hasil harus sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tanggung jawabnya, dan lain-lain.

Korupsi merupakan jalan pintas yang sangat tidak pantas (haram), melanggar aturan, norma, sebab hal itu merugikan rakyat dan negara. Pejabat negara ataupun swasta yang memperoleh hasil tidak sesuai dengan kerjanya itu tidak pantas (*de' nasitinaja*). Ukuran kepatutan itu bisa

¹⁵A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama...*

¹⁶A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama...*, dikutip dari A. Hasan Machmud, h. 76 butir 108. Korupsi, selain tidak pantas (*de' nasitinaja*), ia juga merusak (*makkasolang*), karena iitu korupsi bertentangan dengan nilai budaya Bugis dan sangat memalukan.

diukur dari aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau takaran agama mengenai halal dan haram. Bagaimana kriteria halal dan haram dalam Islam, dan kejujuran adalah iman dan takwa yang hakiki kepada Allah Swt. Dalam kehidupan bernegara, hal ini juga sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia sila pertama Pancasila "Ketuhanan yang Maha Esa" dengan butir-butirnya.

4. Keteguhan (*Agettengeng*)

Dalam bahasa Bugis keteguhan adalah *agettengeng*. Prinsip keteguhan orang Bugis tetap pada asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Seperti halnya nilai kejujuran, nilai kecendikiaan, dan nilai kepatutan, maka nilai keteguhan (*agettengeng*) ini terikat oleh nilai positif. Dikatakan: "*Eppa gau'na gettengnge: tessalaie janci, tessorosie ulu ada, telluka anu pura teppinra assituruseng, mabbicara naparapi, mabbinru'i tepupi napaja*".¹⁷ (Empat nilai keteguhan; *pertama*, tidak mengingkari janji, *kedua*, tidak mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan, *ketiga*, tidak mengubah keputusan, dan *keempat*, berbicara dan berbuat, tidak berhenti sebelum rampung). Nilai-nilai ini sudah lama dikenal sebelum datangnya Islam, dan telah diaplikasikan oleh orang Bugis dalam kultur mereka.

Keteguhan adalah sebuah prinsip keberanian menanggung resiko atas kejujuran, kebenaran, kepantasan, sehingga ia tidak akan mungkin goyah oleh godaan dan praktek suap, politik uang (*many politics*). Keberanian (*awaraning*) kadang harus menanggung resiko berpisahny ruh dan jasad (kematian), tetapi itulah harga diri (*siri*). "lebih

¹⁷A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama...*

baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai” adalah sebuah pribahasa yang sesuai dengan prinsip *siri'* dan *agettengeng*. Lebih baik kehilangan jabatan daripada menduduki jabatan yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Sekali ia menduduki jabatan dan kewenangan, ia harus memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat secara adil (*temmappasilaingeng*). Jadi, jabatan tidak menjadi tujuan, melainkan sebagai kesempatan dan amanah berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi negara dan rakyat.

5. Usaha (Reso)

Nilai-nilai usaha (*reso*) sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kejujuran (*lempu'*), kecendikiaan (*amaaccang*), kepatutan (*asitinajang*), dan keteguhan (*agettengeng*). Bahkan, usaha (*reso*) adalah kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai *lempu'*, *acca*, *asitinajang*, *getteng*, sebab nilai-nilai ini baru dapat berperan secara tepat guna dan berdaya guna apabila didukung oleh nilai-nilai usaha (*reso*). Dengan sendirinya nilai usaha ini pun tegak di atas landasan nilai-nilai tersebut.¹⁸

Lontara mencela orang yang pemalas, tidak ada usahanya, dan hanya menghabiskan waktunya. Nilai-nilai ini seringkali menghiasi kepribadian orang Bugis, sehingga di mana pun mereka berada, kegigihan dan usaha yang maksimal itu senantiasa menghiasi dirinya. Nilai-nilai prinsip itulah yang menjadi kunci keberhasilan orang Bugis, di mana pun bumi dipijak di situ langit dijunjung. Berpajak pada nilai-nilai ini, serta menjunjung tingginya akan melahirkan kepercayaan dan kredibilitas, sehingga mereka dapat eksis

¹⁸Bandingkan dengan A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama...*

dimana pun berada. Sebaliknya, jika nilai-nilai ini tidak menjadi prinsip dalam hidupnya, maka di mana pun mereka mencari keberhasilan, mereka hanya menemukan kegagalan. Ketidakjujuran hanyalah akan melahirkan ketidakpercayaan bagi masyarakat di mana saja mereka berada dan begitu juga kemalasan.

Ada empat hal yang disuruh oleh *lontara'* bagi pengusaha atau peniaga; yaitu *pertama* kejujuran, karena dengannya akan menimbulkan kepercayaan; *kedua*, pergaulan, karena akan dengan pergaulan yang baik akan mengembangkan usaha, *ketiga*, kecendikiaan, karena ia akan memperbaiki pengelolaan dan ketatalaksanaan, dan *keempat*, modal, karena inilah yang menggerakkan usaha.¹⁹ Usaha (*reso*) merupakan kunci kesuksesan hidup bukan hanya bagi orang Bugis, melainkan bagi semua orang di dunia.

Selain itu, ada pula prinsip yang disebut *siri'* (malu) yang merupakan prinsip utama masyarakat Bugis. *Siri'* pada mulanya mengandung makna yang berkonotasi positif, tetapi dapat pula berkonotasi negatif.²⁰ *Siri'* seringkali dimaknai sebagai nilai bagi orang Bugis. Karena itu, jika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, itu memalukan (*mappakasisri'*). Jika ia melakukan hal-hal yang jelek dan memalukan di saat itulah harga diri dan nilainya turun. Sebaliknya, jika ia melakukan hal positif dan baik, di saat itulah ia menaikkan derajat kemanusiaannya sebagai orang Bugis.

Orang yang telanjang dari perasaan malu (*siri'*) adalah

¹⁹A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama...*

²⁰A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama...*

telanjang dari aspek moralitas, dan oleh *lontara'* orang itu diserupakan dengan binatang. Binatang paling buruk adalah binatang yang kerjanya hanya melakukan kerusakan, menjengkelkan, menjijikkan, yakni tikus. Di sawah ia merusak tanaman –disebut hama- padi, setelah dipanen dan disimpan di *rakkiang* rumah juga dirusak, selesai ditumbuk menjadi beras, sudah dimasak, tikus terus mempreteli. Nasi yang sudah dimakannya, dikencingi, diberaki pula, kemudian ia turun ke tanah dan di situ tahi pun dijilatnya, dinding dilobangi, dan kejahatan “kriminal” lainnya.

Jika melakukan yang menyerupai sifat tikus, kerjanya merusak sistem, melanggar aturan, mengacaukan kehidupan, mengumbar aib diri dan orang lain di saat itulah manusia jatuh harga diri dan wibawanya. Jika ia tidak melakukan hal-hal yang mengangkat nilai dan derajat kemanusiaannya, ia bagaikan tikus. Oleh karena itu nilai *siri'* yang berkonotasi positif harus ditegakkan, sehingga tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih bermartabat dan memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan. *Siri'* adalah harga diri, martabat, khususnya bagi masyarakat Bugis. Dalam konteks Islam bahkan, *siri'* itu adalah bagian dari iman.

D. REFORMASI BIROKRASI PERSPEKTIF ALQURAN²¹

Salah satu agenda reformasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih termasuk bersih dari praktik korupsi. Perubahan, khususnya reformasi, itu diisyaratkan

²¹ Tidak banyak ayat ditampilkan dalam ruang ekspresi terbatas ini, penulis hanya menampilkan Q.S. al-Ra'dd/13 : 11, tetapi ayat ini dapat merepresentasi beberapa ayat lainnya yang semakna dan sejalan.

oleh Alquran dengan berbagai ayat, antara lain Q.S. al-Ra'dd/13 : 11, "... *Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*" Menurut M. Quraish Shihab (1997: 32)²² ayat ini mengandung informasi yang amat mendasar. **Pertama**, perubahan bermula dari manusia terlebih dahulu melalui "sisi dalamnya" sebagai makna yang diisyaratkan kata '*anfusihi*'. **Kedua**, perubahan yang bermakna harus melalui sekelompok orang, bukan perorangan, sebagaimana diisyaratkan oleh bentuk jamak/plural '*anfusihi*' yang digunakan pada ayat di atas.

Ayat tersebut dapat pula dihubungkan dengan sebuah gerakan reformasi, ia harus dimulai dari perubahan paradigma, persepsi, pembentukan karakter (*character building*) yang menyentuh sisi dalam (*anfusihi*) pada manusia. Perubahan sistem dan Undang-Undang atau peraturan dan kebijakan tidak cukup, karena manusialah yang menentukan, *the man behind the gun*. Berdasar pandangan ini, maka pendekatan kemanusiaan (*human approach*) dalam reformasi adalah mutlak, walaupun pendekatan sistem (*system approach*) tidak dinafikan pentingnya. Pendidikan nilai merupakan kata kunci untuk melakukan sebuah perubahan positif.

Pada Q.S. al-Ra'd/13: 11, terma '*anfusihi*' (diri mereka sendiri) menunjukkan sisi dalam manusia. Sisi dalam manusia adalah idea-idea/nilai-nilai yang terdapat dalam benaknya, serta diyakini kebenaran dan manfaatnya yang

²² M. Quraish Shihab, "Pendidikan Nilai untuk Pembentukan Sikap dan Prilaku", dalam *Jurnal Pendidikan, Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas* (Ujung Pandang: Lentera Fak. Tarbiyah IAIN Alauddin 1997).

melahirkan tekad yang kuat untuk merealisirnya. Dalam merealisir perubahan, Alquran menempuh prinsip dasar yang dikemukakan oleh Q.S. al-Ra'd/13: 11 di atas. Petunjuk Alquran, untuk memulai perubahan dengan pendidikan nilai serta pembentukan karakter (*character building*) yang kemudian pada gilirannya membentuk karakter dan perilaku yang diharapkan. Konsep pembentukan karakter ini merupakan nilai-nilai inti (*core values*) yang mesti ada adalah reformasi pendidikan. Akan tetapi, hal inilah yang terabaikan dari Sistem Pendidikan Nasional, sehingga yang terjadi adalah pemisahan kecerdasan yang utuh, akibatnya hanya melahirkan generasi intelek yang tidak jujur dan korup. Termasuk pendidikan agama hanya sekedar penguasaan materi, tetapi sringkali melupakan penghayatan dan pengamalan nilai-nilainya.

E. PENUTUP

Korupsi adalah tindakan ketidakjujuran yang bersumber dari karakter individu, masyarakat, lingkungan, dan sistem yang mengatur kehidupan organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Ditinjau dari nilai kearifan lokal khususnya nilai-nilai utama budaya masyarakat Bugis, korupsi merupakan bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan nilai budaya *lempu'* (kejujuran) dan *agetengeng* (keteguhan), *asitinajang* (kepatutan), *amaccang* (kecendikiaan), dan *reso* (usaha atau kerja cerdas dan kerja keras), yaitu *reso temmangingi* (usaha yang sungguh dan tidak putus asa) yang dibingkai dengan keyakinan akan rahmat Tuhan (*pammasena Puang Allah Ta'ala*). Keyakinan kepada Allah mbingkai seluruh nilai-

nilai tersebut. Jika seseorang melakukan korupsi, berarti disamping ia tidak menghayati nilai-nilai agamanya, ia juga tidak menghayati nilai-nilai utama budayanya.

Pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem. Pendekatan kemanusiaan (*human approach*) adalah pendekatan yang menfokuskan pada pemberdayaan *inner capacity* –meminjam istilah Arsyad- berupa pengawasan melekat melalui kesadaran berdasarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang sejalan dengan Alquran. Sedangkan pendekatan sistem adalah pembenahan sistem pengawasan dari perspektif manajerial dan perwujudan tata kelola yang bersih, serta aparatur yang memiliki integritas kepada Tuhan.

Ditinjau dari ajaran Islam, korupsi merupakan perbuatan pencurian yang sangat merugikan, harus dilumpuhkan dengan mencopot jabatannya. Namun, yang lebih penting adalah pembinaan karakter melalui reformasi sistem pendidikan yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai yang luhur. Alquran memandang bahwa perubahan, reformasi harus dilakukan dengan melakukan langkah-langkah perubahan ke arah yang lebih baik, dimulai dari perubahan karakter dan cara berpikir yang lebih baik, dan hal ini harus dimulai dari proses pendidikan. Pada tataran sistem pemerintahan, perubahan tersebut disertai perbaikan sistem pengawasan yang dilakukan secara kolektif. Individu-individu aparatur yang mempunyai karakter yang baik dan tangguh yang didukung oleh sistem yang baik, akan dapat mencegah berbagai tindak pidana korupsi (tipikor).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Dayu, 1985.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hornby, A S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Fifth Edition, New York: Oxford University Press, 1995.
- Mattulada, *Sulawesi Selatan Pra Islam dalam Bultetin Yaperna* No. 12, tahun III.
- Mattulada. "Latoa; Suatu Lukisan terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis", *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1975.
- Mursalim. "Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur'an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan; Kajian terhadap Pemikiran-Pemikirannya", *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*, terj. Abdul Rahman Abud dkk., *The Bugis*. Jakarta: Nalar bekerja sama Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005.
- Rahim, A. Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Riekerk, G.H.M. "Lahirnya Kedatuan Tomanurung" (ceramah), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 13 Agustus 1969.
- Santing, Waspada, dkk. *Refleksi 75 Tahun Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah; Meneguhkan Eksistensi Alauddin*. Cet. I; Makassar; Pustaka Al-Zikra, 2010.
- Shihab, M. Quraish. "Pendidikan Nilai untuk Pembentukan Sikap dan Prilaku", dalam *Jurnal Pendidikan, Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Ujung Pandang: Lentera Fak. Tarbiyah IAIN Alauddin 1997.
